

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agnes, M. Toar. 1989. *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya Di Beberapa Negara*. Ujung Pandang: Penataran Hukum Perikatan II.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: MandarMaju.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hartono. Sri Redjeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: MandarMaju.
- Harjono. 2008. *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Happy Susanto. 2008. *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Yogyakarta: Visimedia.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Mirra Buana Media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Lathif N. Mustika MW dan R.M Mahradi. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: RefikaAditama.
- Nico Ngani. 2012. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philip Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:

- Alfabet. Sukanto Satoto. 2014. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Remaja, I Nyoman Gede. 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Faktus Hukum Panji Sakti, Singaraja 2017.
- Sukanto Satoto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Maria Farida Indriati. S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Retno. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Umum.

Peraturan Perundangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/201, tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 2 tahun 2020 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika

Jurnal

- Kabau Sehat, "Hubungan Antara Pemakaian Jenis Kosmetik Dengan Kejadian Akne Vulgaris" *Jurnal Media Dermatosi Non Bakteri*", 2012, Jurnal Media Medika Muda, Vol. 1, No. 1.
- Lilik Pudjiastuti, Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Peredaran Kosmetik Yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Air Langga, ISBN:

978-602-361-070-9.-----, “Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian”, Disertasi, FH UNAIR, 2013.

Lisa Fazial, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara *Online* Dalam Perspektif *Mabi’* Dalam Aqad *Bai’ Salam* (Studi Kasus Di BPOM Banda Aceh)”, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syaria’ah Fakultas Syariah dan Hukum 2020 M/1441 H Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Mufti Makaarim A, *Kebijakan Umum Keamanan Nasional*, Policy Paper, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Jakarta, 2008.

Novia Ayu Tantri, Arrie Budhiartie, Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Kota Jambi, 2021, Mendapo *Journal Of Administration Law*.

Rudy Susanto, Faisal Abdullah dan Sabir Alwy, “Pengawasan Peredaran Obat Tradisional di Singkawang”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 2, 4 No. 2, 2013, Makassar, Univ. Hasanudin, 2013.

Internet

Anonim, “Profile Badan POM National Agency of Drugs and Food Control Republik of Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan”. <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-faisalboy-7614>, tanggal akses 5 November 2022.

Bikin Pabrik.com, “BPOM Amankan Miliaran Kosmetik Ilegal di Semarang”, diakses melalui <https://bikinpabrik.id/2019/07/08/badan-pom-amankan-miliaran-kosmetik-ilegal-di-semarang>, diakses tanggal 1 September 2022 pukul : 19: 00 WIB.

BPOM, “BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat”, diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal--Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>, diakses tanggal 5 September 2022 pukul : 19: 15 WIB.

BPOM, “Quot Metanol dan Parfum Isu Ulang Quot, Apa Langkah BPOM”, diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/10009/-quot-Metanol-dalam-Parfum-Isi-Ulang-quot--Apa-Langkah-BPOM.html>, diakses 14 November pukul 19.10 WIB.

Daftar Kosmetik Berbahaya, 2019, Diakses Melalui Situs: <https://wisatadestinasia.com/merek-kosmetik-berbahaya-menurut-bpom/> pada tanggal 12 Maret 2023.

Erizka Permatasari, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, diakses melalui

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>, tanggal akses 23 Oktober 2022.
- Ika Meuhthiah, "*Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen*", <http://lkht.com>, download 25 Oktober 2022, jam. 11.45 Wib.
- Investor.com, "BPOM Tertibkan Ribuan Produk Pangan Ilegal Mengandung BKO Bandung dan Bogor", diakses melalui <https://investor.id/lifestyle/285274/bpom-tertibkan-ribuan-produk-pangan-ilegal-mengandung-bko-di-bandung-dan-bogor>, diakses tanggal 1 September 2022 pukul : 19: 00 WIB.
- Kementerian Perindustrian, "Perubahan Gaya Hidup Dorong Industri Kosmetik", diakses melalui <https://kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri-Kosmetik>, diakses tanggal 1 September 2022 pukul : 15: 17 WIB.
- Kementerian Perindustrian, "Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%", diakses melalui <https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20%>, diakses tanggal 2 September 2022 pukul : 15: 00 WIB
- Lilik Pudjiastuti, "Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Peredaran Kosmetika Yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diakses melalui [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9416/8.%20Lilik %20 Pujiastuti.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9416/8.%20Lilik%20Pujiastuti.pdf?sequence=1&isAllowed=y), tanggal akses 15 Maret 2023.
- Riau Barometer, "BPOM Pekanbaru Grebek Toko Yang Dijadikan Gudang Kosmetik Ilegal", diakses melalui <https://riubarometer.com/BPOM-Pekanbaru-Grebek-Toko-Yang-Dijadikan-Gudang-Kosmetik-Ilegal/> diakses tanggal 10 Maret 2023.